

## **Media Briefing Pembahasan RUU P-KS di DPR RI Pada tanggal 28 April 2021**

Jaringan Masyarakat Sipil Advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) mengadakan pertemuan untuk melakukan media briefing secara online via zoom. Dua narasumber pada media briefing ini yaitu Ibu Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (Anggota DPR RI) dan Ibu Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M (HR)., PhD (Dosen Fakultas Hukum UGM).

Perwakilan dari LBH Apik menjelaskan tujuan dari pertemuan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU P-KS, dimana jaringan ini beranggotakan organisasi/lembaga, akademisi, dan individu-individu untuk mengawal advokasi RUU P-KS. Media briefing ini bertujuan untuk membangun komitmen media untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang mendorong keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Diskusi ini juga untuk menjelaskan terkait dengan perlunya pemahaman media dalam pembahasan RUU P-KS ini mulai dari judul, substansi, perkembangannya di DPR RI termasuk persoalan kekerasan seksual yang dialami masyarakat, khususnya perempuan.

Pada pertemuan ini Ibu Diah Pitaloka menjelaskan bahwa saat ini baru masuk Prolegnas sehingga di internal DPR belum ada pembahasan terkait RUU P-KS, kalau pun kemarin ada pembahasan itu sifatnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa elemen dari masyarakat yang menyampaikan dukungannya terhadap RUU P-KS. Untuk perubahan judul biasanya ada perubahan saat dalam proses pembahasan yang dilakukan di DPR RI. terkait dengan penolakan beberapa fraksi di DPR-RI, Fraksi PKS masih mempertanyakan banyak hal namun itu dianggap wajar dalam suatu pembahasan

undang-undang. Narasumber juga menyampaikan bahwa dukungan di DPR makin kuat terhadap RUU ini dibanding periode sebelumnya.

Narasumber kedua, Ibu Sri Wiyanti Eddyono mengawali pemaparannya dengan melihat bahwa berbagai keberhasilan adanya undang-undang tidak lepas dari peran anggota DPR yang ada di senayan, situasi dan kondisi di parlemen merupakan gerakan kunci untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan masyarakat.

Narasumber menyampaikan juga bahwa undang-undang itu produk politik, maka tidak lepas dari berbagai kepentingan sehingga undang-undang itu dibahas, diusulkan, diperdebatkan, hingga ada negosiasi-negosiasi panjang yang menghasilkan peraturan perundang-undangan.

RUU PKS ini banyak catatannya dimulai dari masalah judul, sehingga kemudian dalam pemaparannya muncul beberapa usulan judul diantaranya: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan RUU Kejahatan Seksual. Namun apapun judulnya harus disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2011, termasuk di dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-Undangan.

Zoom Meeting

LIVE on YouTube

Participants (30)

Find a participant

- nurherwati
- Rini Riswani Auval
- Uli
- Wanda MI
- Yowanda Yonggara

Invite Unmute Me

Chat

From liya LBH APIK J... to Everyone:

selamat siang teman teman  
sembari menunggu acara  
dimulai silahkan mengisi  
daftar hadir berikut:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4\\_a8yDg1fcdZq6\\_GnYT-Vtk7zudAKV1bCM6cbdaVCE87](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4_a8yDg1fcdZq6_GnYT-Vtk7zudAKV1bCM6cbdaVCE87)

To: Everyone

LIVE on YouTube

Participants (30)

Find a participant

- Gemma Holliani ...
- Sri Wiyanti Eddyono
- Ardhanareswara Trisha
- Ermelina Singer...
- ELGA NURMUTIA
- LBH APIK Jakarta
- LBH APIK Jakarta
- Elga
- Devina - Anadol...
- Arum Rumiwati
- Uli
- Wanda MI
- Rena Herdiyani
- adinda nita
- Genta - ANTARA
- Anisa Yuliani LB...
- Anggita Suwandani
- nurherwati
- J. Angela Ranitta K.
- Delvira Liputan6.com
- Laili Anisah
- Ami MI
- Rafa Amatullah...
- Yowanda Yonggara
- Agnes Winaryati